



PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

# RENJA

## RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KOPERASI & UKM



[www.diskopukm.sumselprov.go.id](http://www.diskopukm.sumselprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridho-Nya telah dapat diselesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun kedepan.

Penyusunan RENJA-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini dilandasi dengan mempelajari kondisi tahun lalu dan tren yang terjadi dimasa mendatang. Kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional dijadikan acuan di dalam penyusunan, termasuk juga telah mengantisipasi adanya isu strategis dan gejolak sosial sewaktu-waktu yang akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Demikian juga aspirasi masyarakat maupun dunia usaha merupakan masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan, informasi, data, dan kontribusi terhadap tersusunnya RENJA-SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

Palembang, 27 September 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.196605091992031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah .....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	46
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah .....	49
3.3 Program dan Kegiatan.....	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	62
BAB V PENUTUP .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	(TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel 2	(TC.30 ) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	14
Tabel 3	Jumlah Koperasi di Sumatera Selatan .....	20
Tabel 4	Volume Usaha Koperasi di Sumatera Selatan .....	22
Tabel 5	(TC. 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	28
Tabel 6	(TC.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan .....	45
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi & UKM Tahun 2025 .....	49
Tabel 8	(TC.33) Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RENJA perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RENSTRA perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja.

Pada rancangan awal rencana kerja telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2023 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2024. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM, baik di Sumatera Selatan maupun nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan urusan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

### 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025, yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Sumatera Selatan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- Bab II merupakan hasil evaluasi RENJA, baik yang telah dilaksanakan hingga tahun 2023 maupun proyeksi pencapaian tahun 2024 serta isu-isu penting penyelenggaraan perangkat daerah dan *review* terhadap rancangan awal RKPD;
- Bab III Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 serta telaah terhadap kebijakan nasional;
- Bab IV berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif untuk tahun 2025;
- Bab V Penutup.

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2024-2026. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta *Review* terhadap rancangan awal RKPd.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2024-2026. Adapun evaluasi RENJA tahun 2023 didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023.

Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA tahun 2023 dan perkiraan pencapaian RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2024 disajikan melalui tabel TC.29.



*Tabel 1 (TC.29)*  
*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024*  
*Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan*

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	96 %	100 %	98 %	98,00	100 %	98 %	98,00
2	17	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	96 %	100 %	98 %	98,00	100 %	98 %	98,00
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	1 dok	5 dok	5 dok	100,00	3 dok	3 dok	100,00
2	17	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA- SKPD	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100,00	0 dok	0 dok	33,33
2	17	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA- SKPD	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100,00	0 dok	0 dok	-
2	17	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 lap	0 lap	4 lap	4 lap	100,00	0 lap	1 dok	22,22
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 lap	0 lap	12 lap	12 lap	100,00	2 lap	14 dok	116,67
2	17	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	96 %	100 %	97 %	97,00	100 %	98 %	97,67
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100,00	14 bulan	14 bulan	100,00
2	17	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 bulan	13 bulan	13 bulan	13 bulan	100,00	13 bulan	13 bulan	100,00
2	17	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2	17	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100,00	0 dok	0 dok	33,33
2	17	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	0 lap	1 lap	1 lap	100,00	0 lap	0 lap	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2 17 1 1.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 lap	0 lap	4 lap	3 lap	75,00	0 lap	1 lap	25,00
2 17 1 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	100 %	96 %	100 %	97 %	97,00	100 %	98 %	97,67
2 17 1 1.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100,00	0 dok	0 dok	33,33
2 17 1 1.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terpenuhinya diklat kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	12 bulan	12 bulan	1 kali	1 kali	100,00	12 bulan	8 bulan	69,44
2 17 1 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah</b>	100 %	95 %	100 %	96 %	96,00	100 %	97 %	97,00
2 17 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 17 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 17 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 17 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 17 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 17 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00
2 17 1 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100 %	100,00
2 17 1 1.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	9 unit	9 unit	2 unit	2 unit	100,00	0 paket	4 paket	40,74
2 17 1 1.07 5	Pengadaan Mebel				Tersedianya Mebel	6 unit	6 unit	11 unit	11 %	100,00	0 unit	6 paket	94,44
2 17 1 1.07 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud				Tersedianya aplikasi/software penunjang operasional perangkat daerah	2 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100,00	1 aplikasi	1 paket	50,00
2 17 1 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	100 %	94 %	100 %	96 %	96,00	100 %	97 %	96,67
2 17 1 1.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya tagihan telepon, air dan listrik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan
													100,00
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor dan tutor SKJ	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan
													100,00
2	17	1	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>95 %</b>	<b>100 %</b>	<b>95 %</b>	<b>95,00</b>	<b>100 %</b>	<b>97 %</b>
													<b>96,67</b>
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara serta Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100,00	17 unit	17 unit
													100,00
2	17	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan
													100,00
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan
													100,00
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan
													100,00
2	17	2			<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Terfasilitasnya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>
													<b>100,00</b>
2	17	2	1.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terfasilitasnya izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>1 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>
													<b>-</b>
2	17	2	1.01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 unit usaha	0 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	100,00	0 unit usaha	20 unit usaha
													100,00
2	17	3			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Jumlah koperasi sehat</b>	<b>20 koperasi</b>	<b>8 koperasi</b>	<b>20 koperasi</b>	<b>8 koperasi</b>	<b>40,00</b>	<b>20 koperasi</b>	<b>8 koperasi</b>
													<b>40,00</b>
2	17	3	1.01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah pengelola koperasi yang mengikuti peningkatan kompetensi perkoperasian</b>	<b>100 orang</b>	<b>0 orang</b>	<b>100 orang</b>	<b>100 orang</b>	<b>100,00</b>	<b>100 orang</b>	<b>100,00</b>
													<b>100,00</b>
2	17	3	1.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 unit usaha	0 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	100,00	20 unit usaha	40 unit usaha
													200,00
2	17	4			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Jumlah koperasi sehat</b>	<b>20 koperasi</b>	<b>8 koperasi</b>	<b>20 koperasi</b>	<b>8 koperasi</b>	<b>40,00</b>	<b>20 koperasi</b>	<b>8 koperasi</b>
													<b>40,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	17	4	1.01		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Koperasi Binaan provinsi yang mengikuti pelatihan KSP dan USP koperasi</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>
2	17	4	1.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	20 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	0 unit usaha	-	0 unit usaha	0 unit usaha
2	17	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Jumlah UMKM naik kelas</b>	<b>500 UMK</b>	<b>675 UMK</b>	<b>500 UMK</b>	<b>713 UMK</b>	<b>142,60</b>	<b>500 UMK</b>	<b>220 UMK</b>
						<b>Persentase pertumbuhan modal koperasi</b>	<b>2 persen</b>	<b>5 persen</b>	<b>2 persen</b>	<b>195,7 persen</b>	<b>9785,00</b>	<b>8,5 persen</b>	<b>4,9 persen</b>
2	17	5	1.01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikat pelatihan</b>	<b>350 orang</b>	<b>845 orang</b>	<b>350 orang</b>	<b>395 orang</b>	<b>112,86</b>	<b>350 orang</b>	<b>1590 orang</b>
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	350 orang	845 orang	350 orang	395 orang	112,86	438 orang	1678 orang
2	17	5	1.02		<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah SDM UKM yang mendapatkan sertifikat pelatihan</b>	<b>350 orang</b>	<b>845 orang</b>	<b>350 orang</b>	<b>395 orang</b>	<b>112,86</b>	<b>350 orang</b>	<b>1590 orang</b>
2	17	5	1.02	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Meningkatkan kapasitas serta kompetensi SDM UKM	350 orang	845 orang	350 orang	395 orang	112,86	438 orang	1678 orang
2	17	6			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Meningkatnya koperasi yang berkualitas</b>	<b>3 persen</b>	<b>0 persen</b>	<b>0 persen</b>	<b>0 persen</b>	<b>-</b>	<b>1 persen</b>	<b>1 persen</b>
2	17	6	1.01		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah koperasi aktif</b>	<b>20 koperasi</b>	<b>130 koperasi</b>	<b>100 koperasi</b>	<b>101 koperasi</b>	<b>101,00</b>	<b>20 koperasi</b>	<b>20 koperasi</b>
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 unit usaha	0 unit usaha	20 unit usaha	20 unit usaha	100,00	20 unit usaha	20 unit usaha

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan & Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah kenaikan wirausaha baru	350 UKM	0 UKM	350 UKM	210 UKM	60,00	350 UKM	350 UKM	100,00
2	17	7	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	1 persen	1 persen	1 persen	1 persen	100,00	1 persen	1 persen	100,00
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	700 unit usaha	0 unit usaha	350 unit usaha	320 unit usaha	91,43	350 unit usaha	670 persen	95,71
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase kenaikan omzet UMKM	30 persen	11 persen	10 persen	11 persen	110,00	10 persen	32 persen	106,67
2	17	8	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dibina	100 persen	80 persen	100 persen	80 persen	80,00	100 persen	80 persen	80,00
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 unit usaha	0 unit usaha	30 unit usaha	30 unit usaha	100,00	30 unit usaha	30 unit usaha	100,00
2	17	8	1.01	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	200 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	200 orang	200 orang	100,00

Berdasarkan dokumen Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, berikut adalah analisis dari realisasi program dan kegiatan yang disajikan dalam beberapa pokok materi:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Beberapa program tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, baik dari segi keuangan maupun fisik. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kendala teknis, atau tantangan eksternal. Program-program yang tidak memenuhi target meliputi:

- a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi: Target 100% tidak tercapai, dengan realisasi hanya 0% untuk beberapa indikator seperti penerbitan izin untuk koperasi lintas daerah.
- b. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi: Penilaian permodalan dan aspek lainnya pada 20 koperasi tidak terealisasi sama sekali.
- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi: Target peningkatan 3% koperasi berkualitas tidak tercapai, dengan realisasi 0%.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar program berhasil mencapai target yang direncanakan, menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan eksekusi. Contoh kegiatan yang memenuhi target antara lain:

- a. Administrasi Keuangan dan Tugas ASN: Realisasi 100% dalam hal penyediaan gaji dan tunjangan ASN, serta pelaksanaan tugas administrasi.
- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: Realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Realisasi 100% dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas dan fasilitas lainnya selama 12 bulan.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Beberapa program tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melebihi target yang ditetapkan. Program-program ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan kinerja yang lebih baik dari yang diperkirakan. Beberapa program yang melebihi target:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian: Target 350 orang SDM koperasi, tetapi realisasi mencapai 845 orang (112,86%).
- b. Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan: Dari target 20 unit usaha, terealisasi hingga 40 unit usaha yang memenuhi standar (200%).

- c. Pertumbuhan modal koperasi: Persentase pertumbuhan modal koperasi melampaui target 2% dengan realisasi 195,7%.
4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
- Tidak tercapainya target: Beberapa faktor penyebab termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi dari masyarakat sasaran. Misalnya, penerbitan izin usaha simpan pinjam tidak terlaksana karena kurangnya partisipasi koperasi dan kendala birokrasi.
  - Terpenuhinya target: Keberhasilan program seringkali disebabkan oleh perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang cukup, dan dukungan operasional yang kuat. Program seperti Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan lancar berkat pemantauan yang baik.
  - Melebihi target: Faktor efisiensi dan tingginya permintaan atau partisipasi menyebabkan beberapa program melampaui target, seperti pendidikan dan pelatihan SDM koperasi yang menerima partisipasi lebih dari yang diperkirakan.
5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah
- Implikasi Positif: Program yang memenuhi atau melebihi target, seperti pendidikan SDM koperasi dan pertumbuhan modal koperasi, memberikan dampak positif terhadap target jangka panjang Renstra. Ini akan membantu mempercepat pencapaian ekonomi daerah berbasis koperasi dan UMKM.
  - Implikasi Negatif: Program yang gagal mencapai target, seperti penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, berpotensi menghambat pencapaian target Renstra di sektor pengawasan dan pengembangan koperasi yang sehat. Kegagalan ini bisa memperlambat pencapaian keseluruhan kinerja perangkat daerah.
6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab
- Untuk meningkatkan realisasi program di masa mendatang, beberapa kebijakan dan tindakan perlu diambil, antara lain:
- Perencanaan yang Lebih Matang: Perbaiki dalam proses perencanaan agar sesuai dengan kapasitas pelaksana dan target yang realistis. Program yang gagal, seperti penilaian kesehatan koperasi, perlu diatur ulang dengan target yang lebih terukur.

- Optimalisasi Anggaran: Realokasi anggaran dari program yang gagal atau belum berjalan optimal ke program yang menunjukkan potensi lebih besar. Misalnya, alokasi lebih besar ke pendidikan dan pelatihan SDM koperasi untuk memanfaatkan momentum keberhasilan.
- Peningkatan Koordinasi dan Monitoring: Koordinasi lintas instansi dan peningkatan monitoring perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Program seperti peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan memerlukan monitoring yang lebih intensif untuk memastikan pencapaian.

Secara keseluruhan, sebagian besar program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik, dengan beberapa program bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun, masih terdapat sejumlah program yang gagal mencapai target dan memerlukan evaluasi mendalam serta perbaikan dalam perencanaan dan implementasi. Upaya penguatan koordinasi, peningkatan efisiensi, serta pengelolaan anggaran yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kinerja program di tahun-tahun mendatang.

Adapun Capaian Kinerja OPD Tahun Anggaran Berjalan (sampai dengan triwulan II 2024) dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target/Telah Dilaksanakan  
Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, beberapa sub kegiatan telah memenuhi target dan dilaksanakan sesuai rencana. Berikut adalah daftar sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Pengadaan Mebel;
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d. Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi;
  - e. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi;
  - f. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
  - g. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.



2. Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target karena Belum Dilaksanakan
- Beberapa sub kegiatan belum memenuhi target karena belum dilaksanakan, mengindikasikan adanya kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut adalah daftar sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan:
- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - b. Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-Undangan dan Tebentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, tangguh dan Akuntabel;
  - c. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - d. Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi;
  - e. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
  - f. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan; dan
  - g. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Kesimpulan ini mencerminkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Beberapa sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum masuk dalam tahap pelaksanaan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun serta proyeksi capaian indikator kinerja utama pada. Indikator kinerja yang akan dianalisis yaitu mengacu periode Renstra yaitu Renstra 2024-2026. Adapun realisasi capaian kinerja untuk tahun 2024 mencantumkan realisasi sampai dengan data per triwulan II, hal ini disebabkan proses penyusunan Renja berlangsung n-1.

*Tabel 2 (TC.30 )  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan*

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Koperasi Sehat	-	-	250 unit	20 unit	20 unit	-	294 unit	8 unit	20 unit	-	-	-	RENSTRA 2019-2023
2	Jumlah UMKM Naik Kelas	-	-	500 UMK	500 UMK	500 UMK	-	713 UMK	575 UMK	526 UMK	-	-	-	RENSTRA 2019-2023
3	Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi	-	-	2 %	8,5 %	2 %	-	37 %	5,2 %	25,3 %	-	-	-	RENSTRA 2019-2023
4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	-	-	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	13 %	1 %	0,28 %	1 %	1 %	RENSTRA 2024-2026
5	Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru	-	-	700 UKM	350 UKM	350 UKM	-	210 UKM	328 UKM	201 UKM	-	-	-	RENSTRA 2019-2023
6	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	-	-	1 %	1 %	1 %	3 %	1 %	3 %	1 %	6,21 %	1 %	1 %	RENSTRA 2024-2026
7	Persentase kenaikan omset UMKM	-	-	10 %	10 %	10 %	-	11 %	3 %	37 %	-	-	-	RENSTRA 2019-2023
8	Jumlah Koperasi Aktif	-	-	100 unit	20 unit	20 unit	-	101 unit	18 unit	20 unit	-	-	-	RENSTRA 2019-2023
9	Rasio Kewirausahaan	-	-	-	-	-	3,14%	-	-	-	3,09%	3,14%	3,14%	RENSTRA 2024-2026
10	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi	-	-	-	-	-	16%	-	-	-	46,95%	16%	18%	RENSTRA 2024-2026
11	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Serta Penyediaan Makan dan Minum	-	-	-	-	-	3,93 %	-	-	-	2,12 %	3,93 %	4,52 %	RENSTRA 2024-2026
12	Persentase Koperasi Aktif	-	-	-	-	-	66,20 %	-	-	-	60,49 %	66,20%	70,84%	RENSTRA 2024-2026

Secara umum, dari enam indikator yang ada, hanya satu indikator yang mencapai target, yaitu pertumbuhan omzet koperasi. Indikator lainnya menunjukkan realisasi yang berada di bawah target, dengan beberapa indikator menunjukkan selisih yang signifikan dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan strategi baru untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Analisis terhadap capaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

**(1). Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum**

Laju (pertumbuhan) PDRB mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah yang diukur berdasarkan harga konstan, untuk sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor serta penyediaan Makan dan Minum, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini menilai perubahan dalam volume produksi barang dan jasa tanpa pengaruh perubahan harga, sehingga memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi yang sebenarnya di (sub) sektor tersebut. Mengetahui laju pertumbuhan riil per sektor membantu dalam memahami dinamika ekonomi secara mendalam.

Sub-sektor perdagangan besar dan eceran, kecuali penjualan mobil dan sepeda motor serta usaha penyediaan makanan dan minuman, sebagai bagian dari pembentuk PDRB Sumatera Selatan, utamanya banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Pengukuran Laju (pertumbuhan) PDRB sub-kategori ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja UMKM di wilayah Sumatera Selatan dalam suatu periode.

Tingkat capaian indikator yaitu 56%. Faktor Pendorong indikator ini yaitu adanya keterlibatan aktif dari banyak pihak terhadap pengembangan UMKM di daerah.

Faktor Penghambat:

- a. Sulitnya mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang memadai.
- b. Kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan diversifikasi pasar.
- c. Keterbatasan dalam mengadopsi internet dan teknologi terbaru.
- d. Kurangnya koneksi dan jaringan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan.

- e. Keterbatasan dalam manajemen operasional dan pengelolaan bisnis.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator:

- a. Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapabilitas pelaku usaha;
- b. Kolaborasi dengan OJK, BI, komunitas pelaku usaha, BUMD, Bank Himbara dan lembaga eksternal lainnya untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro;

## **(2). Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha**

Peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah rasio jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha dibandingkan dengan jumlah usaha kecil keseluruhan (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Usaha kecil yang menjadi wirausaha artinya pelaku usaha perorangan berhasil meningkatkan skala usahanya sehingga mampu mempekerjakan orang lain dengan skema pembayaran upah yang sesuai ketentuan.

Tingkat capaian indikator usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah 0,02% dengan realisasi yaitu 120 pelaku usaha yang telah mendapat pendampingan usaha. Adapun faktor penghambat, yaitu:

- a. UMKM memerlukan permintaan pesanan baru dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kapasitas produksi kemudian merekrut tenaga kerja;
- b. UMKM tidak dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan kapitalisasi aset agar bisa naik kelas.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kapabilitas pelaku usaha; dan
- b. Pendampingan UMKM untuk *on boarding* ke LKPP.

## **(3). Rasio kewirausahaan**

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri

dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Berdasarkan data Sakernas BPS bulan Februari 2024, angka rasio kewirausahaan di Sumatera Selatan adalah 3,09. Realisasi menunjukkan bahwa target indikator sudah tercapai 98%.

Faktor penghambat:

- a. Kondisi Kredit yang Ketat: Bank dan lembaga keuangan sering menetapkan persyaratan yang ketat untuk pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan *start-up*.
- b. Stigma Sosial: Di beberapa budaya, kegagalan bisnis dapat membawa stigma negatif, menghalangi orang untuk mengambil risiko menjadi wirausahawan.
- c. Pasar yang Jenuh: Persaingan di pasar yang sudah jenuh dapat membuat sulit bagi usaha baru untuk bertahan dan berkembang.
- d. Keterampilan Manajemen yang Kurang: Pengusaha baru sering kali kekurangan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses.

Dukungan kegiatan yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi atau kampanye kewirausahaan kepada kalangan pemuda dan mahasiswa; dan
- b. Pembentukan lembaga inkubator bisnis Sumsel: Inkubator Sriwijaya Bisnis Ce'nter.

#### **(4). *Meningkatnya koperasi yang berkualitas***

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas merujuk pada peningkatan berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dalam manajemen, pelayanan, partisipasi anggota, keberlanjutan ekonomi, dan kontribusi sosial ekonomi yang positif, yang semuanya menggambarkan kualitas dan kinerja yang lebih baik dari koperasi tersebut. Koperasi yang berkualitas merupakan koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya. Meningkatkan koperasi

yang berkualitas berperan penting dalam beberapa aspek, termasuk pertumbuhan pendapatan dan laba koperasi dari tahun ke tahun, kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, tingkat keberlanjutan ekonomi koperasi dalam jangka panjang, serta tingkat kepatuhan koperasi terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Indikator Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas merupakan penghitungan koperasi dari jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibandingkan dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) aktif.

Koperasi sehat merupakan koperasi yang memenuhi kriteria dalam pemeriksaan kesehatan koperasi dengan *output* sehat dan cukup sehat. Tahun 2021 merupakan tahun reformasi pengawasan koperasi melalui diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dimana telah dilakukan penyempurnaan kertas kerja pengawasan koperasi dari sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara parsial menjadi komprehensif.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan Koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

Objek pengawasan Koperasi dibagi dalam 4 (empat) tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). Penentuan tingkat KUK berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan.

	KUK I	KUK II	KUK III	KUK IV
Anggota	<5.000 orang	5.001 - 9.000 orang	9.001 – 35.000 orang	>35.000 orang
Modal Sendiri	<250 juta	> 250 juta s.d 15 Miliar	>15 Miliar - 40 Miliar	>40 Miliar
Aset	<2,5 Miliar	> 2,5 Miliar – 100 Miliar	>100 Miliar - 500 Miliar	>500 Miliar

Dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi berpedoman pada Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. KKPKK terdiri dari aspek tata kelola (paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi terutama bagi KUK 3 dan KUK 4), profil risiko (penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko), kinerja keuangan (evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan), dan permodalan (kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan).

Selanjutnya, terhadap hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam dokumen LHPKK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) yang berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi yaitu:

- *sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $80,00 \leq x \leq 100$
- *cukup sehat*, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $66,00 \leq x < 80,00$ ;
- *dalam pengawasan*, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $51,00 \leq x < 66,00$ ; dan
- *dalam pengawasan khusus*, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $0 < x < 51,00$ .

Sampai dengan Juni 2024 belum terdapat realisasi koperasi sehat dan cukup sehat. Hal ini disebabkan, penilaian kesehatan direncanakan akan dilaksanakan bulan Juli 2024.

Faktor penghambat:

- a. Lembaga yang berkompeten menentukan koperasi yang berkualitas harus mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi;
- b. Banyak koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan izinnya;
- c. Banyak koperasi yang keberadaannya tidak sesuai data ODS;
- d. Belum adanya sanksi yang dapat dipakai dalam pembinaan koperasi;
- e. Izin pendirian tidak memerlukan verifikasi; dan
- f. Penyalahgunaan izin koperasi sebagai suatu badan usaha.

Adapun kegiatan di Tahun 2024 yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target indikator koperasi sehat ini adalah:

- a. Tim Satgas Pengawas Koperasi yang berjumlah 72 orang di Provinsi dan 17 Kab/Kota dilakukan pengawasan Koperasi

secara periodik melalui pemeriksaan kesehatan koperasi dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

- b. Penilaian kesehatan koperasi baik secara mandiri maupun oleh dinas;
- c. Pendidikan dan Pelatihan pengurus Koperasi untuk peningkatan keterampilan teknis dan kapabilitas pengelolaan kelembagaan koperasi; dan
- d. PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) yang berjumlah 62 orang melakukan pendampingan kepada koperasi aktif agar dapat melaksanakan RAT setiap tahunnya.

#### (5). Persentase koperasi aktif

Indikator persentase koperasi aktif merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat vitalitas dan keberlangsungan usaha dari seluruh koperasi yang ada dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Persentase ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya dengan total keseluruhan koperasi yang terdaftar secara resmi. Semakin tinggi persentase koperasi aktif, maka semakin banyak koperasi yang berkontribusi secara nyata dalam perekonomian dan menunjukkan kondisi sektor koperasi yang sehat dan dinamis.

Realisasi koperasi aktif di Sumatera Selatan sampai dengan Juni 2024 sebanyak 4.334 dari 7.170 koperasi terdaftar atau 60%. Persentase koperasi aktif paling tinggi berada di Kab Musi Banyuasin (97%) dan paling rendah di Kab OKU Selatan (16%). Realisasi ini telah mencapai 91% dari target yang ditetapkan.

*Tabel 3 Jumlah Koperasi di Sumatera Selatan*

No.	Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif
1	Ogan Komering Ulu	395	285	72%
2	Ogan Komering Ilir	563	475	84%
3	Muara Enim	511	318	62%
4	Lahat	472	134	28%
5	Musi Rawas	708	564	80%
6	Musi Banyuasin	387	376	97%
7	Banyuasin	507	168	33%
8	Ogan Ilir	192	138	72%
9	OKU Timur	500	222	44%
10	OKU Selatan	248	39	16%
11	Empat Lawang	214	126	59%



No.	Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	% Koperasi Aktif
12	PALI	141	123	87%
13	Musi Rawas Utara	340	91	27%
14	Palembang	1.130	723	64%
15	Prabumulih	149	119	80%
16	Pagar Alam	140	43	31%
17	Lubuklinggau	221	124	56%
	Binaan Provinsi	271	193	71%
	Binaan Nasional	81	76	94%
<b>Jumlah</b>		<b>7.170</b>	<b>4.337</b>	<b>60%</b>

Sumber: ODS per 28 Juni 2024

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini, yaitu:

- Rendahnya jumlah koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan;
- Aktivitas usaha koperasi tidak berjalan; dan
- Pengelolaan koperasi tidak berdampak bagi kesejahteraan anggota.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Konsolidasi tenaga pendamping koperasi (PPKL) untuk mendampingi koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan pengembangan usaha koperasi;
- Penerbitan Sertifikat NIK koperasi;
- Fasilitasi Izin usaha simpan pinjam koperasi;
- Penumbuhan Koperasi syariah; dan
- Pelatihan teknis penguatan tata kelola kelembagaan usaha koperasi.

#### (6). Persentase pertumbuhan omzet koperasi

Persentase pertumbuhan omzet koperasi merupakan indikator penting keberhasilan sebuah koperasi. Angka ini mencerminkan kemampuan koperasi dalam meningkatkan pendapatannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan pengelolaan yang baik, strategi bisnis yang efektif, dan kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan dinamika pasar. Namun, pertumbuhan yang negatif atau stagnan bisa menjadi sinyal adanya masalah internal atau eksternal yang perlu segera diatasi.

Tabel 4 Volume Usaha Koperasi di Sumatera Selatan

No.	Kab/Kota	Volume Usaha Des 2023	Volume Usaha Juni 2024	%
1	Ogan Komering Ulu	7,70	4,59	-40%
2	Ogan Komering Ilir	468,97	1.248,87	166%
3	Muara Enim	105,40	116,53	11%
4	Lahat	36,72	33,12	-10%
5	Musi Rawas	101,59	98,28	-3%
6	Musi Banyuasin	43,10	40,30	-7%
7	Banyuasin	114,47	371,68	225%
8	Ogan Ilir	24,43	23,44	-4%
9	OKU Timur	332,23	363,42	9%
10	OKU Selatan	7,85	7,58	-3%
11	Empat Lawang	0,85	0,81	-5%
12	PALI	10,29	5,07	-51%
13	Musi Rawas Utara	6,58	5,65	-14%
14	Palembang	476,21	528,54	11%
15	Prabumulih	10,30	6,01	-42%
16	Pagar Alam	20,87	18,10	-13%
17	Lubuklinggau	17,79	12,46	-30%
	Binaan Provinsi	202,99	252,18	24%
	Binaan Nasional	50,33	4,46	-91%
<b>Jumlah</b>		<b>2.033,67</b>	<b>3.141,10</b>	<b>54%</b>

Realisasi pertumbuhan omzet koperasi sampai dengan Juni 2024 sebesar 54% atau telah tercapai 338% dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan paling besar terjadi di Kab Banyuasin (225%) dan terendah di Kab PALI (-51%).

Faktor Pendorong yang menyokong tercapainya indikator ini yaitu proses *entry* data koperasi melalui aplikasi ODS yang terus diperbaiki dan ditingkatkan. Sementara, Faktor penghambat yang menjadi kendala di beberapa daerah, yaitu:

- Aktivitas usaha koperasi tidak bergerak signifikan, dan
- Koperasi belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam berusaha.

Dukungan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Temu mitra koperasi,
- Advokasi digitalisasi koperasi, dan
- Fasilitasi pembiayaan melalui LPDB-KUMKM Dana Bergulir, PIP, dan KUR.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### ***Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Mei 2024***

Laporan Bank Indonesia Bulan Mei 2024 menunjukkan bahwa Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh menguat pada triwulan I 2024 sebesar 5,06% (yoy) yang didorong oleh akselerasi belanja pemerintah dan meningkatnya produktivitas produk pertanian. Kinerja keuangan pemerintah pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan realisasi baik dari sisi pendapatan maupun belanja, didorong kegiatan pemilu, penyelesaian infrastruktur, dan momen Hari Raya. Gabungan inflasi di Sumatera Selatan pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,24% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang sebesar 3,17% (yoy). Penyaluran kredit UMKM tumbuh menjadi sebesar 24,06% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya dengan tingkat risiko yang masih dalam batas aman. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2024, didukung oleh penerapan sistem pembayaran yang cepat mudah murah aman dan handal, baik menggunakan metode tunai maupun metode non-tunai. Pada triwulan I 2024 kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan penurunan, meskipun demikian optimisme masyarakat ke depan relatif baik. Ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat tahun 2024 didukung oleh inflasi yang terjaga dan ditopang oleh permintaan domestik yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang solid pada triwulan I 2024, ditopang oleh akselerasi belanja pemerintah dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, membuka peluang besar bagi pengembangan koperasi dan UMKM. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan pemberdayaan UMKM akan semakin memperkuat fondasi ekonomi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi dan UMKM dapat berperan lebih aktif dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### ***Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi***

Rendahnya jumlah koperasi berkualitas di Sumatera Selatan diawali dengan sedikitnya koperasi yang menerapkan tata Kelola usahanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT setiap tahunnya. Permasalahan besar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
  - b. Kaum muda (millenials) sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi yang berdampak pada tata kelola koperasi yang sulit mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan.
2. Kelembagaan
- a. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih belum optimal sebab masih didominasi koperasi simpan pinjam (credit union);
  - b. Koperasi akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait;
  - c. Koperasi masih dianggap sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum dipandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Pembiayaan.
- Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
4. Produksi dan Pemasaran
- Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

### ***Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM***

Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 61,07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
  - a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan hanya 22,48%.

- b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi.
  - c. Tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.
- 2. Produksi dan Pemasaran
  - a. Jumlah produk UMKM ekspor masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
  - b. Kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa).
  - c. Masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara online.
  - d. Masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.
- 3. Pembiayaan
 

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak. Di sisi lain, jasa pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 4. Kelembagaan
 

Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat dominan yakni mencapai 98,68%.

### ***Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Kewirausahaan***

Peringkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, berdasarkan Global Entrepreneurship Index 2019 (GEI) Indonesia masih menempati peringkat ke-75 dari 137 negara. Indeks Entrepreneurship Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia peringkat 43, Brunei Darussalam peringkat 53, Thailand peringkat 54, dan Vietnam 73. Selain itu, rasio kewirausahaan Indonesia tahun 2020 baru sekitar 3,47%, angka ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76 persen, Thailand sebesar 4,26 persen serta Malaysia yakni 4,74 persen.

Beberapa permasalahan kewirausahaan di Indonesia dimana bahwa sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dinilai masih rendah seiring dengan rendahnya literasi kewirausahaan sejak usia dini. Selain itu, ekosistem untuk mendorong berkembangnya kewirausahaan belum menjadi sub sistem yang terbangun di tengah masyarakat khususnya pelaku usaha. Beberapa pihak banyak yang melakukan

pelatihan, pendampingan dan dukungan ekspor namun dilakukan secara sporadis, belum adanya keterhubungan dan sinergi kewirausahaan melalui inkubator, pendekatan ekosistem yang utuh.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan skala usaha, peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penduduk muda Indonesia tersebut berpotensi menjadi wirausaha dan tenaga kerja yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial budaya di perkotaan maupun perdesaan.

### ***Permasalahan dan Tantangan Organisasi Perangkat Daerah***

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMM juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan pada struktur organisasi saat ini, yaitu:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan UKM kurang optimal untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum selaras dengan struktur organisasi yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai,
2. Indikator Kinerja di setiap bidang kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART) sehingga berdampak pada aktivitas kegiatan pada masing-masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD,
3. Terbatasnya jumlah SDM di OPD yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Koperasi dan UMKM. Dan dari jumlah SDM yang adapun, kapasitas aparatur yang menguasai substansi Koperasi, UMKM dan Pengembangan Kewirausahaan masih sangat rendah.

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas, hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan perizinan dan kelembagaan koperasi,
2. Peningkatan akses pembiayaan & kemitraan koperasi,

3. Peningkatan upaya pembaharuan koperasi,
4. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi,
5. Peningkatan pertumbuhan wirausaha produktif,
6. Peningkatan usaha yang bertransformasi dari informal ke formal,
7. Terwujudnya pemberdayaan UMKM yang efektif, dan
8. Peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan UMKM

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Pada tabel 2.3 disajikan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.

*Tabel 5 (TC. 31)*  
*Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025*  
*Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan*

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.694.449.611	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.388.217.800	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				22.694.449.611	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				21.388.217.800	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	16.426.806.611	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-	14.432.325.800	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	310.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	278.000.000	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	278.000.000	
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	30.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Dokumen	30.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	-	



KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				Semua Kel/Desa	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	11.189.508.811	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	8.880.533.000	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812 Orang/ Bulan	10.120.728.811		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812 Orang/ Bulan	8.054.737.000	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	748.540.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	656.316.000	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	240.240.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	169.480.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	30.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	230.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	230.000.000	
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	150.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	150.000.000	
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	30.000.000		-	-	-	-	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	80.000.000	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	1.420.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	1.800.000.000	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Semua Kota/Kab,	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	200.000.000		Semua Kota/Kab,	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	600.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	280.000.000	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	700.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	700.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	120.000.000	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	1.290.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	800.000.000	
2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	500.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	500.000.000	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	300.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	
2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Pengadaan Aset Tetap Lainnya					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	90.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud					Pengadaan Aset Tak Berwujud					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	
2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	530.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	675.200.000	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	320.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	330.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Semua Kel/Desa	Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	325.200.000	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	1.457.297.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	1.768.592.800	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	300.660.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	374.524.000	
2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	100.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	906.637.800		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.294.068.800	
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		-	-	<b>140.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>		-	-	<b>100.000.000</b>	
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	70.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	100.000.000	
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	20 Unit Usaha	70.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	20 Unit Usaha	100.000.000	



KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<i>Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>					<i>Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>			
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	70.000.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	-	
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>	20 Unit Usaha	70.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>	-	-	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		-	-	<b>170.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		-	-	<b>150.000.000</b>	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	170.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	150.000.000	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	170.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	150.000.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		-	-	100.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		-	-	100.000.000	
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	100.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	100.000.000	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	100.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		-	-	3.807.643.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		-	-	1.442.500.000	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	3.807.643.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	1.442.500.000	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					
		Semua Kota/Kab,	Jumlah SDM yang Memahami	300 Orang	3.807.643.000		Semua Kota/Kab,	Jumlah SDM yang Memahami	438 Orang	1.442.500.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengetahuan Perkoperasian				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengetahuan Perkoperasian			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		-	-	450.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		-	-	400.000.000	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	450.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		-	-	400.000.000	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000	
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	20 Keluarga	50.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	20 Keluarga	50.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa	Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				Semua Kel/Desa	Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	20 Unit Usaha	200.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	20 Unit Usaha	250.000.000	
2.17.07	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		-	-	500.000.000	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		-	-	3.029.783.351	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		-	-	500.000.000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		-	-	3.029.783.351	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan					Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan	200 Unit Usaha	400.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan	200 Unit Usaha	176.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kel/Desa	Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				Semua Kel/Desa	Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	50 Orang	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	656 Orang	2.753.783.351	
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha					Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha					
		-	-	-	-		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	400 Unit Usaha	100.000.000	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		-	-	<b>1.100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		-	-	<b>1.733.608.649</b>	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		-	-	1.100.000.000	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		-	-	1.733.608.649	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					
		Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas	150 Unit Usaha	1.000.000.000		Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas	150 Unit Usaha	1.500.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>			
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM					
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i>	10 Orang	100.000.000		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i>	200 Orang	233.608.649	
J U M L A H					22.694.449.611					21.388.217.800	

Berdasarkan tabel TC.31 di atas, berikut adalah penjelasan terkait perubahan pagu anggaran dan target kinerja pada Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) tahun 2025.

1. Total Pagu Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pagu indikatif awal yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp22.694.449.611. Namun, berdasarkan hasil analisis kebutuhan, anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi Rp21.388.217.800, dengan penurunan sebesar 5,75%. Penurunan ini terjadi meskipun terdapat beberapa program yang menunjukkan peningkatan target kinerja.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program ini awalnya sebesar Rp16.426.806.611, namun mengalami penurunan menjadi Rp14.432.325.800, turun sebesar 12,12%.
- Kinerja: Di sisi lain, target jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah meningkat dari 2 dokumen menjadi 5 dokumen, menunjukkan adanya peningkatan target kinerja sebesar 150%, meskipun pagu anggarannya berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dengan anggaran yang lebih kecil, efektivitas penyusunan dokumen diharapkan meningkat secara signifikan.

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Pagu Anggaran: Anggaran administrasi keuangan mengalami penurunan cukup besar, dari Rp11.189.508.811 menjadi Rp8.880.533.000, atau turun sebesar 20,65%.
- Kinerja: Meskipun anggaran turun, target jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tetap sama, yaitu 812 orang/bulan. Ini mencerminkan bahwa meskipun terjadi efisiensi biaya, tidak ada pengurangan dalam alokasi gaji dan tunjangan pegawai.

4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program pendidikan dan latihan perkoperasian turun drastis dari Rp3.807.643.000 menjadi Rp1.442.500.000, mengalami penurunan sebesar 62,12%.
- Kinerja: Jumlah SDM yang ditargetkan untuk memahami pengetahuan perkoperasian justru meningkat, dari 300 orang menjadi 438 orang, atau meningkat sebesar 46%. Ini menunjukkan bahwa program pelatihan perkoperasian lebih diarahkan kepada peningkatan kapasitas individu meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program ini turun dari Rp450.000.000 menjadi Rp400.000.000, mengalami penurunan sebesar 11,11%.

- Kinerja: Target jumlah unit usaha yang produktif, memiliki akses pasar, dan didukung dengan penguatan kelembagaan tidak berubah, tetap pada 20 unit usaha. Meski anggaran berkurang, kinerja yang ditargetkan tidak mengalami perubahan.
6. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Pagu Anggaran: Program pemberdayaan UMKM mengalami lonjakan anggaran yang signifikan, dari Rp500.000.000 menjadi Rp3.029.783.351, dengan kenaikan sebesar 505,96%. Hal ini menunjukkan adanya fokus prioritas dalam pengembangan UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
  - Kinerja: Sejalan dengan peningkatan anggaran, jumlah SDM yang ditargetkan memahami pengetahuan UMKM meningkat tajam, dari 50 orang menjadi 656 orang, mencerminkan peningkatan 1212%. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kapasitas SDM UMKM guna mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
7. Program Pengembangan UMKM
- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program ini naik dari Rp1.100.000.000 menjadi Rp1.733.608.649, mengalami kenaikan sebesar 57,6%.
  - Kinerja: Target pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah tetap pada 150 unit usaha, namun terjadi peningkatan dalam dukungan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Pagu Anggaran: Anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah naik dari Rp1.457.297.800 menjadi Rp1.768.592.800, meningkat sebesar 21,38%.
  - Kinerja: Alokasi ini difokuskan pada pemeliharaan gedung kantor dengan satu gedung yang direhabilitasi. Kenaikan anggaran menunjukkan bahwa pemeliharaan infrastruktur menjadi prioritas dalam memastikan kelangsungan operasional pemerintahan.
9. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Pagu Anggaran: Program ini mengalami sedikit penurunan anggaran dari Rp170.000.000 menjadi Rp150.000.000, turun sebesar 11,76%.
  - Kinerja: Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa tetap sama, yaitu 20 unit usaha. Penurunan anggaran tidak berdampak pada pengurangan target pemeriksaan, yang menunjukkan efisiensi biaya.
10. Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
- Pagu Anggaran: Anggaran untuk program ini tetap sama, yaitu Rp100.000.000.
  - Kinerja: Target penilaian kesehatan koperasi tetap pada 20 unit usaha. Stabilitas anggaran mencerminkan pentingnya aspek penilaian kesehatan



koperasi dalam menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan koperasi di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan pada beberapa program, seperti administrasi keuangan dan pendidikan perkoperasian, ada peningkatan signifikan pada anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM dan pemeliharaan barang milik daerah. Hal ini mencerminkan bahwa fokus pemerintah daerah bergeser untuk memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi serta menjaga keberlangsungan operasional perangkat daerah melalui pemeliharaan infrastruktur yang memadai.

Penurunan anggaran pada beberapa program disertai dengan efisiensi yang diterapkan tanpa mengorbankan target kinerja, sementara peningkatan anggaran diarahkan untuk program-program strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan UMKM.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini diuraikan program/kegiatan dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Musrenbang SKPD melalui portal SIPD RI.

*Tabel 6 (TC.32)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan*

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Sido Mulyo, Belitang, OKU Timur	Pelatihan Literasi dan Akses Keuangan bagi Pelaku UMKM	-	Proposal usulan tidak dilengkapi RAB dan TOR kegiatan. Untuk Kegiatan-kegiatan Pelatihan biasa dilaksanakan rutin melalui Dana DAK Nonfisik PK2UMK.
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Ma Beliti, Musi Rawas	Perlunya pelatihan dan pengembangan SDM bagi pelaku UMKM	-	Proposal usulan tidak dilengkapi RAB dan TOR kegiatan. Untuk Kegiatan-kegiatan Pelatihan biasa dilaksanakan rutin melalui Dana DAK Nonfisik PK2UMK.
3	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Area masjid Agung Assalam, Lubuklinggau	Taman inflasi UMKM	-	Merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	4 (empat) Kecamatan, Lubuklinggau	Belum optimalnya kompetensi pelaku usaha untuk Pelatihan Kewirausahaan, Manjerial, Literasi, Teknologi, dan Akses Keuangan	-	Merupakan kewenangan Kabupaten/Kota

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan nasional.

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 memperlihatkan komitmen yang kuat dalam memperkuat peran koperasi, UMKM, dan kewirausahaan sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor-sektor tersebut. Berikut adalah telaah komprehensif yang terstruktur mengenai kebijakan tersebut:

1. Penguatan Kelembagaan Koperasi
  - a. Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Modern
    - Tantangan: Koperasi di Indonesia seringkali mengalami kendala dalam hal tata kelola dan akses ke pembiayaan, sehingga memerlukan revitalisasi agar dapat bersaing di era ekonomi modern yang dinamis.
    - Kebijakan: RKP 2025 berfokus pada penguatan kelembagaan koperasi melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas, tata kelola, dan regulasi yang relevan dengan koperasi multipihak. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan koperasi yang lebih efisien dan transparan, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
    - Implementasi: Dukungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk membantu koperasi yang unbankable menjadi bankable dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
  - b. Revitalisasi Koperasi Sektor Strategis
    - Fokus: Penguatan koperasi dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengoptimalkan

peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berbasis komunitas.

- Strategi: Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga penting dalam rantai pasok sektor pertanian dan perikanan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor melalui penguatan koperasi sebagai penggerak utama produksi domestik.

## 2. Pengembangan UMKM untuk Ekosistem Ekonomi Berdaya Saing

### a. Peningkatan Akses dan Daya Saing UMKM

- Tantangan: UMKM di Indonesia sering menghadapi kendala dalam hal akses pembiayaan, sertifikasi, standardisasi produk, serta koneksi ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global.
- Kebijakan: RKP 2025 menekankan pada pengembangan ekosistem UMKM melalui sejumlah inisiatif seperti bantuan formalisasi usaha, pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk.
- Langkah Nyata: Pemerintah mendorong kemitraan strategis antara UMKM dan perusahaan besar, baik dalam rantai pasok domestik maupun global. Melalui kolaborasi ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta daya saing di pasar internasional.

### b. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

- Fokus: Memanfaatkan teknologi digital untuk membantu UMKM bersaing di era industri 4.0, termasuk dalam hal pemasaran digital, e-commerce, dan inovasi produk.
- Implementasi: Inkubasi usaha berbasis teknologi dan riset, serta pengembangan inovasi pembiayaan bagi UMKM. Upaya ini difasilitasi oleh pemerintah melalui penyediaan akses ke teknologi yang lebih murah dan mudah diakses, serta pengembangan satu data koperasi dan UMKM untuk memperkuat sinergi antar lembaga.

## 3. Peningkatan Kewirausahaan yang Inklusif dan Berkelanjutan

### a. Mendorong Pertumbuhan Kewirausahaan Nasional

- Tantangan: Rasio kewirausahaan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama dalam hal kewirausahaan yang inovatif dan berbasis teknologi.
- Kebijakan: RKP 2025 menargetkan pertumbuhan kewirausahaan yang lebih inklusif dan inovatif dengan

mendukung wirausaha baru melalui penyederhanaan birokrasi, pemberian insentif, serta pendampingan dalam pemanfaatan teknologi.

- Strategi: Pemerintah mengarahkan kebijakan kewirausahaan untuk mendukung sektor-sektor strategis yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja, seperti agribisnis, pariwisata, dan industri kreatif. Selain itu, penumbuhan wirausaha perempuan dan wirausaha muda juga menjadi prioritas utama.

b. Kewirausahaan Berbasis Riset dan Teknologi

- Fokus: Mendorong inkubasi kewirausahaan berbasis riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di tingkat nasional dan internasional.
- Langkah Nyata: Program inkubasi bisnis yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha untuk menciptakan wirausaha yang mampu memanfaatkan hasil riset dalam pengembangan produk dan model bisnis yang inovatif.

4. Sinergi dan Kolaborasi Antar-Lembaga

a. Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga

- Tantangan: Banyaknya program kewirausahaan, koperasi, dan UMKM yang tersebar di berbagai kementerian menyebabkan fragmentasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- Kebijakan: RKP 2025 menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program penguatan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, terutama melalui koordinasi yang lebih baik antar kementerian terkait.
- Langkah Nyata: Implementasi sistem satu data untuk koperasi dan UMKM, serta penyesuaian regulasi yang mendukung kewirausahaan, agar lebih sinkron dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.

Kebijakan terkait koperasi, UMKM, dan kewirausahaan yang tertuang dalam RKP 2025 dirancang secara komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Fokus utama terletak pada penguatan kelembagaan, peningkatan akses ke pembiayaan dan teknologi, serta pengembangan kewirausahaan berbasis riset dan inovasi. Dengan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, diharapkan sektor koperasi, UMKM, dan kewirausahaan mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil dan merata.

Dengan strategi kebijakan prioritas Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi di atas telah sejalan dengan kebijakan pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Koperasi dan UKM yang mendukung visi kepala daerah yaitu:

*"Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan"*

Dan bersinergi dalam tataran Prioritas Daerah yakni pada "Prioritas Daerah 1: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" serta "Prioritas Daerah 4: Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum"

Selanjutnya, mengacu pada tema pembangunan daerah maka diharapkan peran Koperasi dan UMKM dapat mendukung dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang masih berada di atas tingkat nasional.

### 3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis tahun 2024-2026. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025:

*Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi & UKM Tahun 2025*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM	1. Meningkatnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM daerah	(1). Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Serta Penyediaan Makan dan Minum	4,52%
			1.1. Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	3,5%
			1.2. Rasio Kewirausahaan	3,14%
		2. Meningkatnya laju produktivitas usaha koperasi	(2) Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	5%
			2.1. Persentase Koperasi Aktif	70,84%
			2.2. Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi	18%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan beberapa faktor, diantaranya: kebijakan Nasional, RPJP, RPD, dan Renstra SKPD. Secara garis besar usulan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 8 program, 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp21.388.217.800,- yang bersumber pada APBD Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi sasaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah 17 Kab/Kota se-Sumatera Selatan. Adapun Rumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel TC.33 berikut ini.

*Tabel 8 (TC.33)*  
*Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026*  
*Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan*

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
A	2.17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah		100%	14.432.325.800			100%	15.473.797.000			
	2.17.01.101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Sumsel	100%	200.000.000	PAD		100%	260.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.101.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	2 dokumen	200.000.000	PAD		2 dokumen	260.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Output = Ratek Perencanaan ; Dokumen
	2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku		100%	8.958.533.000			100%	10.833.137.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.102.01	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumsel	812 OB	8.054.737.000	DAU		812 OB	9.844.357.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Tambah Akres 2,5%
	2.17.01.102.02	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sumsel	12 dokumen	734.316.000	PAD		12 dokumen	748.540.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Gaji Honor Pegawai TKS,TKPD 13 Bulan
	2.17.01.102.03	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumsel	12 dokumen	169.480.000	PAD		12 dokumen	240.240.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Honor pejabat penatausahaan keuangan dan lain-lain
	<b>2.17.01.1.05</b>	<b>Kegiatan</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Sumsel	100%	<b>230.000.000</b>			100%	<b>200.000.000</b>	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.105.02	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumsel	2 paket	150.000.000	PAD		2 paket	150.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi	Baju Seragam dan Baju Olahraga

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.105.09	<b>Sub Kegiatan</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumsel	3 orang	80.000.000	PAD		3 orang	50.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pegawai yang mengikuti (PIM)
	<b>2.17.01.1.06</b>	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		100%	<b>1.800.000.000</b>			100%	<b>2.100.000.000</b>	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.106.01	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumsel	1 paket	50.000.000	PAD		1 paket	50.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.106.02	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	1 paket	600.000.000	PAD		1 paket	900.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Belanja Modal,Belanja AC, PC dll



No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.106.04	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumsel	2 paket	280.000.000	PAD		2 paket	300.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Makan-Minum Rapat,ATK
	2.17.01.106.05	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumsel	2 paket	50.000.000	PAD		2 paket	50.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.106.09	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam daerah dan luar daerah	12 laporan	700.000.000	PAD		12 laporan	700.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Output=Perjalanan Dinas
	2.17.01.106.11	<b>Sub Kegiatan</b> Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumsel	1 dokumen	120.000.000	PAD		1 dokumen	100.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Website Dinas Koperasi
	<b>2.17.01.1.07</b>	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah		100%	<b>800.000.000</b>			100%	<b>200.000.000</b>	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.107.02	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumsel	9 Unit	500.000.000	PAD		-	0	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	1 Mobil;8 Motor Listrik
	2.17.01.107.05	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	300.000.000	PAD		1 Paket	200.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Untuk Keperluan Ruang Display UKM(Lemari Display)
	<b>2.17.01.1.08</b>	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	<b>675.200.000</b>			100%	<b>530.000.000</b>	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.1.08.01	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumsel	12 Laporan	20.000.000	PAD		12 Laporan	20.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.01.1.08.02	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumsel	12 Laporan	330.000.000	PAD		12 Laporan	320.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.1.08.04	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumsel	12 Laporan	325.200.000	PAD		12 Laporan	190.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Jasa Kebersihan, Keamanan (Kontrak)
	<b>2.17.01.1.09</b>	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	<b>1.768.592.800</b>			100%	<b>1.350.660.000</b>	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.109.02	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumsel	25 Unit	374.524.000	PAD		25 Unit	300.660.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Pemeliharaan Kendaraan, Pajak Kendaraan, BBM
	2.17.01.109.06	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	20 Unit	100.000.000	PAD		20 Unit	100.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi	Pemeliharaan AC

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
											Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Birokrasi dan Trantibum	
	2.17.01.109.09	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sumsel	1 Unit	1.294.068.800	PAD		1 Unit	950.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Rehab Gedung, Ren ovasi Halaman Parkir, Pagar
2	2.17.02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase koperasi yang memiliki sertifikat NIK</b>		25,13%	100.000.000			27,29%	200.000.000			
	2.17.02.1.01	<b>Kegiatan</b> Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>Persentase koperasi yang memiliki izin usaha</b>		7,66%	100.000.000			9,02%	200.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	2.17.02.1.01.01	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Sumsel	20 unit usaha	100.000.000	PAD		30 unit usaha	200.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Izin Khusus Koperasi Simpan Pinjam, Sosial isasi
3	2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Meningkatnya koperasi yang berkualitas</b>		5%	150.000.000			5%	600.000.000			

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya		20%	150.000.000			20%	600.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	2.17.03.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-Undangan dan Tebentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, tangguh dan Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Sumsel	20 unit usaha	150.000.000	PAD		60 unit usaha	600.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi yang diawasi dan dibina (sesuai dengan peraturan baru)
4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		5%	100.000.000			5%	500.000.000			
	2.17.04.1.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang mendapat pemeriksaan kesehatan		10%	100.000.000			10%	500.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	2.17.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian	Sumsel	20 unit usaha	100.000.000	PAD		50 unit usaha	500.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Penilaian Kesehatan Koperasi (melibatkan akuntan publik)

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
5	2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha</b>		13,46%  3,5%	1.442.500.000			14,80%  4,0%	2.200.000.000			
	2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitas dan kompetensinya</i>		2%	1.442.500.000			2%	2.200.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	2.17.05.1.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sumsel	438 Orang	1.442.500.000	DAK-NF PK2UMK		438 Orang	2.200.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	DAK Non- Fisik untuk pelatihan koperasi
6	2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi aktif</b>		70,84%	400.000.000			76,51%	2.400.000.000			
	2.17.06.1.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>-Persentase pertumbuhan omzet koperasi -Persentase koperasi yang melaksanakan RAT -Persentase koperasi yang mengadopsi teknologi informasi -Proporsi penyaluran dana bergulir di SUMSEL</i>		18%  10,60%  1,46%  0,38%	400.000.000			20%  11,13%  2,19%  0,42%	2.400.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	2.17.06.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses	Sumsel	20 unit usaha	100.000.000	PAD		100 unit usaha	1.500.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Pentaan Manajemen, Standarisasi dan restrukturisasi	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha								Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Kesejahteraan Masyarakat	
	2.17.06.1.01.03	<b>Sub Kegiatan</b> Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Sumsel	20 Keluarga	50.000.000	PAD		15 Keluarga	100.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Penyuluhan Keluarga Berkoperasi
	2.17.06.1.01.09	<b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Sumsel	20 unit usaha	250.000.000	PAD		20 unit usaha	800.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi Koperasi untuk mengakses permodalan
7	2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha</b>		4%	3.029.783.351			4%	5.053.783.351			
	2.17.07.1.01	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>Rasio kredit UMKM terhadap total kredit Persentase usaha yang bermitra dengan industri menengah/besar</b>		25,68% 70%	3.029.783.351			26,96% 75%	5.053.783.351	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.07.1.01.01	<b>Sub Kegiatan</b> Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Sumsel	200 unit usaha	176.000.000	PAD		500 unit usaha	2.000.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Bimtek Kemiskinan (P3KE)
	2.17.07.1.01.02	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Sumsel	656 Orang	2.753.783.351	DAK-NF PK2UMK		656 Orang	2.753.783.351	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pelatihan UKM Vokasional
	2.17.07.1.01.011	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Sumsel	400 Unit Usaha	100.000.000	PAD		400 Unit Usaha	300.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
8	2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Rasio Kewirausahaan</b>		3,14%	1.733.608.649			3,14%	2.700.000.000			



No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	2.17.08.1.01	<b>Kegiatan</b> Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<b>Persentase pertumbuhan wirausaha</b> <b>Jumlah promosi dan pemasaran produk UKM</b> <b>Jumlah UMKM on-boarding digital</b>		3,50%  7 kali  105.787 UMKM	1.733.608.649			4,00%  8 kali  105.787 UMKM	2.700.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	2.17.08.1.01.01	<b>Sub Kegiatan</b> Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Dalam daerah dan luar daerah	150 Unit Usaha	1.500.000.000	PAD		150 Unit Usaha	2.500.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Lokasi pelaksanaan disesuaikan
	2.17.08.1.01.02	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Sumsel	200 orang	233.608.649	DAK-NF PK2UMK		200 orang	200.000.000	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Lokasi pelaksanaan disesuaikan
<b>Jumlah</b>						21.388.217.800				29.127.580.351			

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Salah satu tahapan dalam proses perencanaan Pemerintah Daerah adalah pembuatan dokumen RKPD. Dokumen RKPD ini mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD. Selain itu dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD.

Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### **CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPD) dan rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan RENJA Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
2. Komitmen tersebut selanjutnya harapnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2025 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya

## **RENCANA TINDAK LANJUT**

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2025, selanjutnya RENJA Tahun 2025 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 No. 565  
Telp. (0711) 355804  
Fax. (0711) 352082  
PALEMBANG - 30129

